



LKJIP 2025

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
2025**

KECAMATAN TAMBAK



DAFTAR ISI

Halaman Juduli

Kata Pengantarii

Ikhtisar Eksekutifiii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. 1

 C. Susunan Organisasi5

 D. Sumber Daya Aparatur6

 E. Isu Strategis 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

 A. Rencana Strategis 9

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 11

 C. Rencana Anggaran Tahun 2026 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA19

 A. Capaian Kinerja Organisasi19

 B. Analisis Capaian Kinerja22

 C. Realisasi Anggaran38

 D. Prestasi dan Penghargaan38

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja39

 B. Progres Penyelesaian isu-isu strategis40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tambak Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Tambak dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tambak pada Tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Tinggi** (104.06%). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tambak 2025. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak dapat disimpulkan :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan (101,16%) Indikator tercapai dengan kategori "**Sangat Tinggi**";
- b. Nilai Maturitas SPIP Kecamatan (112,39 %) Indikator tercapai dengan kategori "**Sangat Tinggi**".

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Maturitas SPIP Kecamatan (112,39 %) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tambak Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan

Tambak bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan ***Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri***.

Adapun realisasi anggaran yang diperoleh adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program ini bertujuan pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.437.555.127 dengan realisasi sebesar Rp 2.189.693.209 dengan tingkat capaian sebesar 89,83%.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Program ini bertujuan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.390.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,28%
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini bertujuan pemenuhan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.982.250 dengan realisasi sebesar Rp 14.255.000 dengan tingkat capaian sebesar 79,27%.
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Program ini bertujuan pemenuhan layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.016.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.000.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,94%.

5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program ini bertujuan pemenuhan layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.385.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.800.000 dengan tingkat capaian sebesar 41,05%.
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini bertujuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.020.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.895.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,22%.

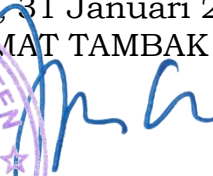
KATA PENGANTAR

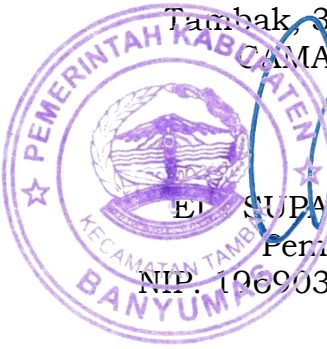
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tambak, 31 Januari 2026
CAMAT TAMBAK

Ed SUPARYONO, S. Sos
Pembina Tk.1
NIP. 19690326 199203 1 006



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Tambak, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Tambak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Tambak merupakan salah satu Kecamatan

dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Tambak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Tambak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk

- menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:

- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

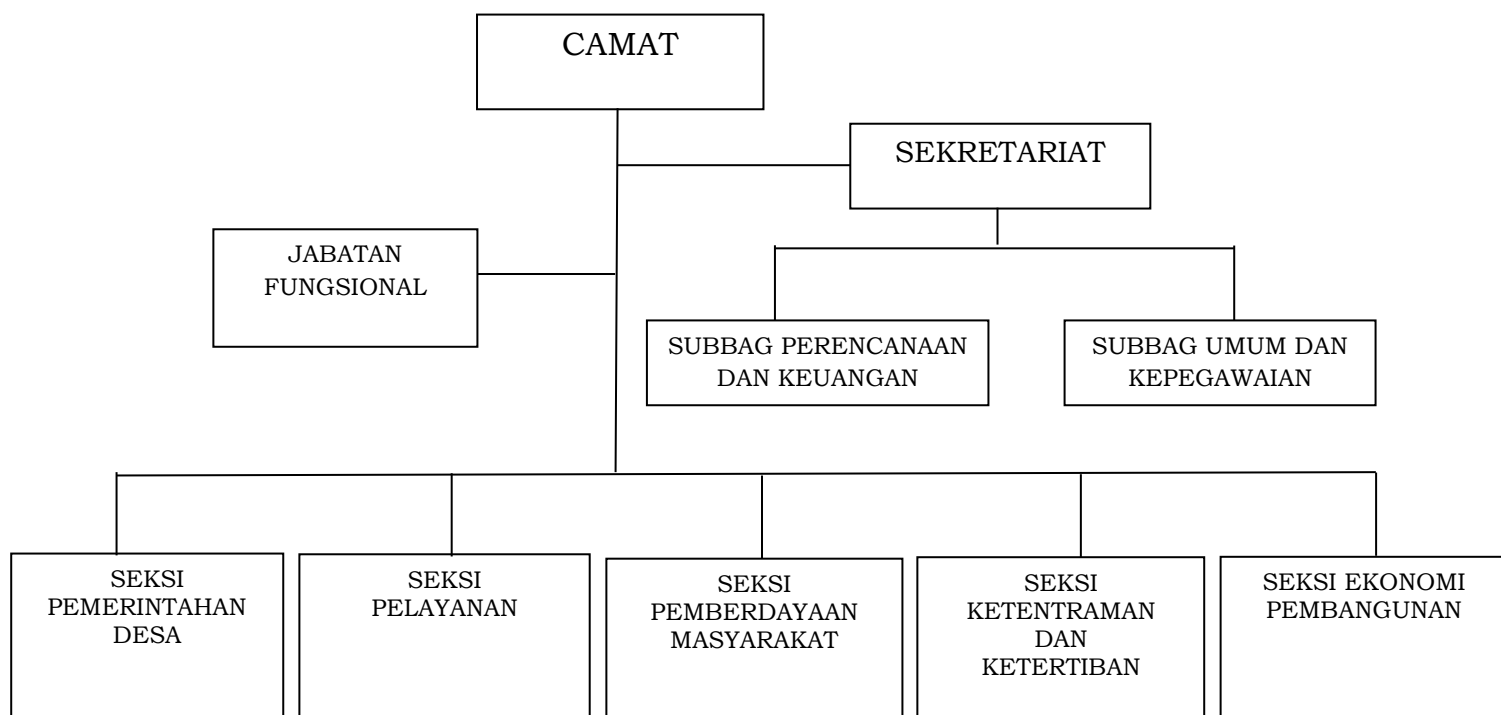
C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Tambak terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Tambak



D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1.
ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	-	-	-	-
Golongan II	-	-	-	-
Golongan III	4	5	9	60%
Golongan IV	3	0	3	20%
B. PPPK				
Jumlah	-	3	3	20%
Jumlah Total	7	8	15	100%

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	-	-	-	
SMP	-	-	-	
SMA	4	1	5	33,333%
D-I	-	-	-	
D-II	-	-	-	
D-III	-	2	2	13,333%
S-1	2	5	7	46,667%
S-2	1	-	1	6,667%
S-3				
Jumlah	7	8	15	100%

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambak adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”**.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan PD berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tambak adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Masih rendahnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;
4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Rendahnya kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;

8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
10. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki ijin;
12. Masih belum berkembangnya BUM Des;
13. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
14. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
16. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
17. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tambak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambak berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut: **“Menjadikan Banyumas yang Maju , Adil Makmur dan Mandiri”** Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Kembaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Tambak yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatahat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan dan Sasaran

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Tambak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambak
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan

Sumber : Rensta Kecamatan Tambak Tahun 2025

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak
Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Formulasi : Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$ Tipe Perhitungan : progres positif Sumber Data : Data Kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TAMBAK
TAHUN 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
TUJUAN				
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	100,0%	Formulasi : Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan Perhitungan : Progres Positif Sumber Data : Laporan/dokumen Pemerintahan
Sasaran				
a.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100,0%	Formulasi : (20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum) Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data: Laporan/dokumen yang terkait

b.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	83,05	Formulasi : Nilai SAKIP kecamatan Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data: Laporan/dokumen Sakip
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	Formulasi : APBDes tepat waktu/Total APBDes*100% Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data: Laporan/dokumen Seksi Pempdes
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,5	Formulasi : Nilai IKM Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data: Laporan/dokumen Pelayanan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	Formulasi : Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani/Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi*100% Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data: Laporan/dokumen Trantibum
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				

	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data: Laporan/dokumen seksi permas
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Formulasi : Urusan penugasan yang dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan*100% Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data: Laporan/dokumen pemerintahan

Sumber :Renstra 2025-2026 Kecamatan Tambak, 2025

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tambak pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Tambak setelah perubahan sebesar Rp. 2.386.228.900,00 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.376.828.900,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 9.400.000,00 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.437.555.125

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	1.390.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	17.982.250
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	27.016.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	4.385.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	16.020.000
Jumlah	Rp	2.504.348.375

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Tambak melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tambak Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	104.5	104.5	Tercapai

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
2.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	107,3	107,3	Tercapai
3.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	%	3,51	3,15	89,74	Tidak Tercapai
Sasaran 2 Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan						
4.	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Indeks	82.9	83.65	101,9	Tercapai
5	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.35	3.765	112.39	Tercapai
Program 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
6.	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
7.	Persentase desa yang difasilitasi penyusunan APBDes	%	100	100	100	Tercapai
8.	Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
Program 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90,5	92.75	103,06	Tercapai
10	persentase pelaksanaan penyelenggaraan	%	100	100	100	Tercapai

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	pemerintahan dan pelayanan publik					
Program 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
11.	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
12	Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	Tercapai
Program 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
13.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	102	102	Tercapai
Program 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
14.	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
Program 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
15.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	Tercapai
Rata-Rata Capaian					101,39	

Sumber : Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak tahun 2025 adalah sebesar **101,39%**.

1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Tambak
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	104.5	104.5

Berdasarkan indikator Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan diperoleh realisasi sebesar 104,06 % dengan formulasi Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dengan Tipe Perhitungan : progres positif Sumber Data : Data Kecamatan

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	104,06	104,06
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	104,5	104,5

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, data untuk tahun 2021 hingga 2023 tidak tersedia (tercatat sebagai "N/A"), sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, terdapat perubahan indikator tujuan kinerja menjadi Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Indikator ini diukur dalam satuan persentase (%), dengan target 100% dan capaian realisasi 101,42%, menunjukkan bahwa Kecamatan berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	104,06	104,5	100	104,5

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dapat disimpulkan bahwa kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga akhir Tahun 2026. Target kinerja untuk Tahun 2025 adalah 100%, namun realisasi yang tercapai mencapai 104,5%, yang menunjukkan pencapaian melebihi ekspektasi sebesar 4,5%. Hasil ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan telah berhasil mencapai kinerja yang lebih baik dari yang ditargetkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	104,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Indikator kinerja yang diukur adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 104,06%,. Namun, untuk data lebih lanjut, tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

- e. Tampilkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.
- 2) Berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah dilaksanakan

Solusi yang dilakukan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Dalam pencapaian telah dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya. Sehingga ada komitmen bersama untuk dapat merealisasikan

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2025	Selisih (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.713.357.564	Rp 2.437.555.125	Rp 275.802.439
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 39.375.000	Rp 1.390.000	Rp 37.985.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 57.595.000	Rp 17.982.250	Rp 39.612.750
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 54.000.000	Rp 27.016.000	Rp 26.984.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2.650.000	Rp 4.385.000	Rp (1.735.000)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 40.380.000	Rp 16.020.000	Rp 24.360.000
			Efisiensi	Rp 403.009.189

2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja

a. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, terdapat beberapa program dengan *refocusing* anggaran yang mencerminkan perbedaan antara anggaran awal dan anggaran akhir. Secara keseluruhan, perbedaan antara anggaran awal dan anggaran akhir menunjukkan adanya efisiensi sebesar Rp 13.463.077, yang berasal dari pengurangan anggaran di beberapa program serta penyesuaian anggaran di program-program lain.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	89,83%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.75	99,28%
		persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	102%	79,27%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	99,94%
		Persentase penanganan pengaduan	100	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	41,05%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	99,22
		Persentase desa yang difasilitasi penyusunan APBDes	100%	
		Persentase Penyusunan RKPDDes tepat waktu	100%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, semua program yang tercantum menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program ini bertujuan pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.437.555.125 dengan realisasi sebesar Rp. 2.189.693.209 dengan tingkat capaian sebesar 89,83%.
- 2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Program ini bertujuan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.390.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,28%.
- 3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini bertujuan pemenuhan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.982.250 dengan realisasi sebesar Rp 14.255.000 dengan tingkat capaian sebesar 79,27%.
- 4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Program ini bertujuan pemenuhan layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.016.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.000.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,94%.
- 5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program ini bertujuan pemenuhan layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.385.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.800.000 dengan tingkat capaian sebesar 41,05%.
- 6) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini bertujuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan , terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.020.000

dengan realisasi sebesar Rp 15.895.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,22%.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Tambak
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	107.3	107.3
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3.51	3.15	89,74

Berdasarkan indikator Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan diperoleh realisasi sebesar 107.3% dengan formulasi Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$ dengan Tipe Perhitungan : progres positif Sumber Data : Data Kecamatan

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan	%	100	107,08	107,08
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	107,3	107,3
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3.51	3.15	89,74

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, data untuk tahun 2021 hingga 2023 tidak tersedia (tercatat sebagai "N/A"), sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, indikator yang digunakan yaitu persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan. Meskipun target yang ditetapkan masih 100%, realisasinya melebihi target, mencapai 107,3%. Dengan capaian sebesar 107,3%, ini menunjukkan bahwa kinerja pada Tahun 2025 berhasil melebihi ekspektasi dan target yang ditentukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan	%	100	107,3	107,3	100	107,3
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3.51	3.15	89,74	89,74	89,74

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga akhir Tahun 2026. Target kinerja untuk Tahun 2025 adalah 100%, namun realisasi yang tercapai mencapai 107,3%, yang menunjukkan pencapaian melebihi ekspektasi sebesar 7,3%. Hasil ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan telah berhasil mencapai kinerja yang lebih baik dari yang ditargetkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional,
Provinsi Dan Kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan	107,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja yang diukur adalah Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 107,3. Namun, untuk data lebih lanjut, tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- a. Implementasi sistem digital dalam administrasi Kecamatan telah meningkatkan efisiensi layanan, sehingga mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan capaian kinerja.
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai Kecamatan melalui

bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan telah meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja memungkinkan adanya perbaikan yang lebih cepat terhadap kendala yang muncul.
- d. Sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, turut mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.
- e. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan Kecamatan yang lebih baik turut mendorong peningkatan capaian kinerja, terutama dalam aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Peningkatan kualitas layanan dengan menerapkan sistem digital, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan.

Penyebab Kegagalan dalam pencapaian target adalah :

- Implementasi sistem digital dalam administrasi Kecamatan belum efisiensi layanan, sehingga memperlambat proses pelayanan dan
- Belum adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai Kecamatan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan telah meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja memungkinkan adanya perbaikan yang lebih cepat terhadap kendala yang muncul.
- Belum maksimalnya fasilitas kantor untuk pelayanan

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai

upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

abel 3.12
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2025	Selisih (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.713.357.564	Rp 2.437.555.125	Rp 275.802.439
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 39.375.000	Rp 1.390.000	Rp 37.985.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 57.595.000	Rp 17.982.250	Rp 39.612.750

4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 54.000.000	Rp 27.016.000	Rp 26.984.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2.650.000	Rp 4.385.000	Rp (1.735.000)
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 40.380.000	Rp 16.020.000	Rp 24.360.000
			Efisiensi	Rp 403.009.189

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, terdapat beberapa program dengan perubahan anggaran yang mencerminkan perbedaan antara anggaran awal dan anggaran akhir, namun terdapat efisiensi anggaran. Secara keseluruhan, perbedaan antara anggaran awal dan anggaran akhir menunjukkan *refocusing* anggaran di beberapa program lain.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan penunjang	100%	89,83%

	DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan perangkat daerah		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.75	99,28%
		persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	102%	79,27%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	99,94%
		Persentase penanganan pengaduan	100	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	41,05%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	99,22%

		Persentase desa yang difasilitasi penyusunan APBDes	100%	
		Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, semua program yang tercantum menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan. Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, capaian kinerja mencapai 100% sementara realisasi keuangan 89,83%, menunjukkan efisiensi anggaran. Begitu pula dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, di mana capaian kinerja 100% lebih tinggi dari realisasi keuangan 99,94%, yang juga menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien. Pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, capaian kinerja mencapai 100% sementara realisasi keuangan hanya 79,27%, menunjukkan efisiensi anggaran

Efisiensi yang paling signifikan terlihat pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, capaian kinerja mencapai 102,28% sementara realisasi keuangan 99,22%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan ini menunjukkan pencapaian yang signifikan terhadap sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan Tahun 2025, baik dari segi indikator kinerja maupun realisasi keuangan.

3. Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas pemerintah Kecamatan

a) Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintah Kecamatan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Kecamatan Tambak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan	Nilai	83.05	83.65	101,9
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.35	3.765	112.39

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja yang diukur adalah nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP pemerintahan Kecamatan. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan LHE SPIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 83,05, sementara realisasi yang tercapai adalah 83,65. Sedangkan untuk SPIP Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3,35, sementara realisasi yang tercapai adalah 3,765. Dengan demikian, capaian yang diperoleh mencapai 101,9% dan 112,39%, yang menunjukkan bahwa realisasi melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan dalam hal nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan.

- a. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah Kecamatan dengan realisasi dan capaian indikator kinerja Tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A

Tahun 2022				
Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan	Nilai	82,05	82,9	101,04
Tahun 2025				
Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan	Nilai	83.05	83.65	101,9
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.35	3.765	112.39

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, data untuk tahun 2021 hingga 2023 tidak tersedia (tercatat sebagai "N/A"), sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, indikator yang digunakan adalah nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP pemerintahan Kecamatan. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan LHE SPIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 83,05, sementara realisasi yang tercapai adalah 83,65. Sedangkan untuk SPIP Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3,35, sementara realisasi yang tercapai adalah 3,765. Dengan demikian, capaian yang diperoleh mencapai 101,9% dan 112,39%, yang menunjukkan bahwa realisasi melebihi target yang telah ditentukan, Kecamatan berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam hal akuntabilitas kinerja, menggambarkan peningkatan yang signifikan dalam aspek tersebut.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Target
Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan	Nilai	83.05	83.65	101,9	83.65	101,9
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.35	3.765	112.39	112.39	112.39

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada indikator kinerja SAKIP dan SPIP pemerintahan Kecamatan, capaian Tahun 2025 menunjukkan nilai 83,05, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 sebesar 83,65. Meskipun demikian, persentase kinerja berdasarkan Renstra hingga Tahun 2025 mencapai 101,9%, menunjukkan bahwa realisasi kinerja secara keseluruhan telah melebihi target yang direncanakan. Sementara itu, target akhir Renstra untuk Tahun 2026 ditetapkan sebesar 82,09, yang menunjukkan bahwa dalam perencanaan jangka panjang, pemerintah Kecamatan berusaha mempertahankan nilai kinerja yang optimal.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumeh
Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	83,65	70,01	82,63	66,86	72,40	81,80	72,50

Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3,765	3,00		3,174			
--------------------------------------	-------	------	--	-------	--	--	--

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Indikator kinerja yang diukur adalah Nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 82,9 lebih tinggi dari standar nasional 70,01. Provinsi Jawa Tengah mencatatkan nilai 82,63, sementara Kabupaten Cilacap menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai 81,80. Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen memiliki nilai sedikit lebih tinggi dari standar nasional, yakni 72,40 dan 72,50. Namun, Kabupaten Purbalingga dengan nilai 66,86 berada di bawah standar nasional dan memerlukan perbaikan dalam akuntabilitas kinerjanya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan realistis, sehingga memudahkan pemantauan pencapaian.
- 2) Optimalisasi pelaksanaan program dengan strategi yang tepat, sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih baik dari yang direncanakan.
- 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program serta tindak lanjut yang cepat terhadap hambatan yang muncul.
- 4) Transparansi dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.713.357.564	Rp 2.437.555.125	Rp 275.802.439
Efisiensi				-

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, dapat diketahui rincian anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran awal atau induk yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 2.713.357.564. Namun, setelah dilakukan perubahan, anggaran yang disetujui dan dialokasikan kembali menjadi Rp 2.437.555.125.

- f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	89,83%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan, dengan realisasi keuangan sebesar 89,83 %.

Adapun penyebab beberapa indikator tersebut belum mencapai target kinerja antara lain :

- 1) Perubahan prioritas atau fokus program yang mengakibatkan sebagian kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini sering terjadi karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan yang lebih mendesak.
- 2) Tidak terpenuhinya jumlah pegawai menyebabkan adanya selisih anggaran yang tidak dapat direalisasikan, khususnya dalam komponen gaji dan tunjangan. Meskipun pengelolaan administrasi keuangan tetap berjalan sesuai prosedur, namun ada kekosongan jabatan di kecamatan tambak berkontribusi pada persentase realisasi yang lebih rendah dari target.
- 3) Kebijakan atau peraturan yang berubah secara mendadak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dapat memengaruhi jalannya kegiatan, termasuk anggaran yang tersedia atau prosedur pelaksanaannya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Evaluasi berkala rutin dilakukan terhadap pelaksanaan program untuk menilai apakah prioritas yang sudah berubah masih relevan dengan kondisi saat itu sehingga program tetap berjalan efektif.
- 2) Revisi anggaran untuk gaji dan tunjangan guna penyesuaian anggaran untuk mengganti selisih yang terjadi akibat kekurangan pegawai. Anggaran yang tidak terpakai dalam komponen gaji dan tunjangan bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang mendesak.

- 3) Koordinasi dengan pihak berwenang dengan meningkatkan koordinasi antara pihak pelaksana program dan instansi terkait agar perubahan kebijakan atau peraturan dapat segera diketahui dan direspons dengan cepat. Ini dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan tersebut.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, program akan lebih siap dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaannya, dan dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat perubahan prioritas, keterbatasan pegawai, atau perubahan kebijakan yang mendadak.

4. Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase desa yang difasilitasi penyusunan APBDes	%	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDdes tepat waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 indikator yaitu indikator persentase APBDes yang disusun tepat waktu dan indikator Persentase APBDes tepat waktu , Persentase desa yang difasilitasi penyusunan APBDes dan Persentase Penyusunan RKPDdes tepat waktu. Target yang ditetapkan adalah 100%, dan realisasi yang tercapai juga 100%. Dengan demikian, capaian dari 2 (dua) indikator kinerja ini adalah 100%, yang menunjukkan bahwa APBDes

berhasil disusun tepat waktu dan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan target yang ditentukan.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.21 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase APBDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				
Persentase APBDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase APBDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100

Tahun 2025				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase desa yang difasilitasi penyusunan APBDes	%	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, data untuk tahun 2021 hingga 2023 tidak tersedia (tercatat sebagai "N/A"), sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, terdapat 3 indikator kinerja. Indikator pertama adalah Persentase APBDes tepat waktu, yang memiliki target 100%. Pada tahun 2025, realisasi dan capaian keduanya tercatat 100%, menunjukkan bahwa pencapaian tersebut sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kedua adalah persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang juga memiliki target 100% dan tercapai 100% pada tahun yang sama. Ini menandakan bahwa kedua aspek ini berhasil dilaksanakan dengan baik pada tahun 2025, sesuai dengan target yang ditentukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel 3.22

Perbandingan Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		

Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, untuk persentase APBDes tepat waktu, target yang ditetapkan adalah 100%, dan realisasi serta capaian pada tahun 2025 juga tercatat 100%, yang berarti target ini tercapai dengan sempurna. Selain itu, target untuk tahun 2026 akhir Renstra juga tetap 100%, dan persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 mencapai 100%, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja di bidang ini sangat baik dan sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang juga memiliki target dan capaian 100% pada tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase APBDes tepat waktu	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Indikator kinerja yang diukur adalah Persentase APBDes tepat waktu dan Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil realisasi, 2 indikator ini tercatat mencapai 100 %. Namun, untuk data lebih lanjut, tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam menyusun dan mengelola anggaran merupakan faktor penentu. Pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam hal administrasi keuangan dan pengelolaan anggaran akan sangat mendukung kelancaran penyusunan APBDes yang tepat waktu.
- 2) Komunikasi yang baik antar lembaga pemerintah desa dan antar tingkat pemerintahan sangat penting. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan pengesahan APBDes, sementara koordinasi yang baik memfasilitasi pemahaman bersama terkait kebijakan, regulasi, dan waktu yang ditetapkan.
- 3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti kecamatan atau dinas terkait, dapat memberikan dorongan dan pemantauan terhadap kesiapan APBDes. Pengawasan yang efektif akan membantu mendeteksi potensi masalah lebih dini, sehingga solusi dapat diambil dengan cepat untuk menjaga agar target waktu tercapai.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan dan penyusunan APBDes juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pengelolaan anggaran secara manual.

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan

lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 40.380.000	Rp 16.020.000	Rp 24.360.000
Efisiensi				Rp 24.360.000

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, anggaran awal atau induk, program ini memiliki anggaran sebesar Rp 8.000.000. Namun, setelah adanya

refocusing anggaran akhir untuk program ini meningkat menjadi Rp 7.805.000. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 195.000 antara anggaran awal yang disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan atau alokasi yang lebih tepat dalam implementasi program ada efisiensi.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	99.22

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase desa yang mendapatkan pendampingan. Pada kegiatan ini, realisasi kinerjanya mencapai 100%, yang berarti seluruh desa yang direncanakan mendapat pendampingan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa, terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.020.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.895.000 dengan tingkat capaian sebesar 99.22 %

5. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.25 sebagai berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90,5	92.75	103,6
Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator yang digunakan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat. Target yang ditetapkan adalah 90,5, dan realisasi yang tercapai sebesar 92,75. Dengan demikian, capaian yang diperoleh mencapai 103,6 % dari target yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa hasil yang tercapai sedikit melebihi target yang ditentukan. Untuk indikator persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Target yang ditetapkan adalah 100%, dan realisasi yang tercapai sebesar 100%. Dengan demikian, capaian yang diperoleh mencapai 100 % dari target.

- b) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.27 sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A

Tahun 2024				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	90	102,27
Tahun 2025				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,5	92,75	103,6
Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, data untuk tahun 2021 hingga 2023 tidak tersedia (tercatat sebagai "N/A"), sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 90,5 dan realisasi 92,75. Hasil capaian yang diperoleh adalah 103,6%, menunjukkan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Sedangkan indikator yang digunakan adalah Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan target 100% dan realisasi 100%. Hasil capaian yang diperoleh adalah 100%, menunjukkan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	90	Indeks	90	100

Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025, indikator kinerja yang diukur adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Target untuk tahun 2025 adalah 90,5, sementara realisasi yang tercapai mencapai 92,75. Sedangkan indikator kinerja lainnya adalah Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Target untuk tahun 2025 adalah 100%, sementara realisasi yang tercapai mencapai 100%. Dengan demikian, persentase pencapaian realisasi terhadap target tersebut adalah 100%. Sedangkan untuk target akhir Renstra pada tahun 2026, Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan pada angka 92,75. Dengan capaian yang sudah ada hingga 2025, persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan.

- d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	92,75	N/A	88	99,7	90,17	93,78	96,76
Persentase pelaksanaan penyelenggaraan	100%						

pemerintahan dan pelayanan publik							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk berbagai daerah. Secara keseluruhan, realisasi indeks kepuasan masyarakat tercatat sebesar 92,75, namun standar nasional tidak tersedia (N/A). Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, indeks kepuasan masyarakat mencapai 88, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi keseluruhan. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Cilacap mencatatkan nilai tertinggi dengan 96,76, menunjukkan kepuasan masyarakat yang sangat tinggi. Kabupaten Kebumen juga memiliki nilai yang sangat baik, yaitu 93,78, sedangkan Kabupaten Banjarnegara mencatatkan 90,17. Kabupaten Purbalingga memiliki nilai 99,7, yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang luar biasa di daerah ini.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Jika pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan ramah, masyarakat cenderung merasa lebih puas.
- 2) Penerapan inovasi dalam pelayanan publik, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat, dapat meningkatkan pengalaman positif mereka
- 3) Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keterampilan pegawai kecamatan. Pegawai yang terlatih dengan baik dan memiliki sikap profesional akan memberikan
- 4) pelayanan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 5) Proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan secara rutin membantu kecamatan dalam mengidentifikasi masalah yang ada serta segera mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.30
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 39.375.000	Rp 1.390.000	Rp 37.985.000
Efisiensi				Rp 37.985.000

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, anggaran awal atau induk, program ini memiliki anggaran sebesar Rp 39.375.000. Namun, setelah adanya *refocusing* anggaran akhir untuk program ini meningkat menjadi Rp 1.390.000. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 37.985.000 antara anggaran awal dan anggaran akhir, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

g) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	99.28

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.390.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,28 % sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,72%.
6. Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja yang dipantau adalah persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dan persentase penanganan pengaduan, dengan satuan pengukuran dalam persen (%). Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Pada realisasinya, tercapai 100%, yang berarti capaian ini mencapai 100%. Dengan kata lain, target yang telah ditetapkan tercapai sepenuhnya, dan persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dan persentase penanganan pengaduan mencapai hasil yang optimal.

- b) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.33 sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				

Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Berdasarkan tabel yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa data indikator kinerja untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak tersedia dan tercatat N/A sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, terdapat dua indikator kinerja yang tercatat, yaitu persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dan persentase penanganan pengaduan. Untuk kedua indikator tersebut, target yang ditetapkan adalah 100%, dan baik pada realisasi maupun capaian, keduanya berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pada tahun 2025 sangat baik dan sesuai dengan harapan atau target yang ditentukan. Dengan capaian 100% pada kedua indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi atau unit yang dimaksud telah mencapai hasil yang optimal dalam menangani gangguan trantibumlinmas dan pengaduan.

- c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.34 sebagai berikut :

Tabel 3.34

Perbandingan Capaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, untuk persentase penanganan gangguan trantibumlinmas, target yang ditetapkan adalah 100%, dan baik realisasi maupun capaian pada tahun 2025 tercatat 100%, yang berarti target ini tercapai dengan sempurna. Selain itu, target untuk tahun 2026 akhir Renstra juga tetap 100%, dan persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 juga mencapai 100%, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja di bidang ini sangat baik dan sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan persentase penanganan pengaduan, yang memiliki target 100% dan tercatat 100% pada capaian tahun 2025. Namun, tidak ada data yang tersedia mengenai target tahun 2026 atau persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025, yang tercatat sebagai N/A.

- d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut :

Tabel 3.35

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kedua indikator kinerja yang dianalisis adalah persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dan persentase penanganan pengaduan, yang keduanya tercatat dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian untuk kedua indikator tersebut di tingkat daerah yang tercatat sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%. Namun, tidak ada data yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, Provinsi Jawa Tengah, atau perbandingan dengan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e) Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan sering melibatkan berbagai instansi, seperti polisi, Satpol PP, dinas terkait, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara instansi-instansi ini sangat penting untuk mempercepat respon terhadap gangguan yang terjadi.
- 2) Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, petugas dapat dengan cepat mengetahui kondisi dan situasi di lapangan, serta meresponsnya dengan cepat. Teknologi juga membantu dalam pelaporan dan pemantauan gangguan secara lebih efisien.
- 3) Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan sangat membantu dalam mempercepat penanganan gangguan. Jika masyarakat merasa terlibat dan diberdayakan, mereka cenderung lebih

cepat melaporkan peristiwa yang mencurigakan atau gangguan yang terjadi.

- 4) Respons yang cepat dan tepat dalam menangani gangguan, baik dari pihak keamanan, Satpol PP, maupun pihak terkait lainnya, akan menentukan sejauh mana gangguan tersebut bisa ditangani dan target tercapai.

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.36
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 54.000.000	Rp 27.016.000	Rp 26.984.000
Efisiensi				Rp 26.984.000

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, menunjukkan data mengenai anggaran untuk program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Anggaran awal atau induk untuk program ini sebesar Rp 54.000.000, dilakukan *refocusing* anggaran menjadi Rp 27.016.000. Selisih antara anggaran awal dan anggaran akhir adalah sebesar Rp 26.984.000 sehingga tidak ada efisiensi.

g) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	99,94

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan, realisasi kinerjanya mencapai 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.016.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.000.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,94 %

7. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a) Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.38 sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan indikator kinerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Indikator yang diukur adalah persentase pemberdayaan masyarakat. Target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasi yang tercapai adalah 100%. Dengan demikian, capaian persentase pemberdayaan masyarakat mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target telah tercapai seperti yang direncanakan.

b) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.39 sebagai berikut :

Tabel 3.39

Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, tidak ada data yang tersedia (tercatat sebagai N/A), sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2025, indikator yang digunakan adalah persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan target 100%, namun realisasi yang tercapai adalah 100%, yang menghasilkan capaian sebesar 100%, menunjukkan bahwa target tersebut berhasil terlampaui.

- c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan

target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.40 sebagai berikut :

Tabel 3.40

Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan indikator kinerja terkait persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada tahun 2025 serta capaian hingga tahun 2026. Pada tahun 2025, target dan realisasi keduanya adalah 100%, dengan capaian sebesar 100%. Selain itu, pada akhir Rencana Strategis (Renstra) 2026, target yang ditetapkan untuk persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan juga tetap 100%, dan pada tahun 2025, persentase kinerja Renstra mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pemberdayaan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik untuk tahun 2025 maupun untuk keseluruhan periode hingga akhir Renstra 2026.

- d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indikator kinerja yang diukur adalah Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian untuk indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%. Namun, tidak ada data yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, Provinsi Jawa Tengah, atau perbandingan dengan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e) Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan masyarakat sendiri sangat mendukung keberhasilan pemberdayaan. Sinergi yang baik ini menciptakan dukungan yang lebih luas terhadap program-program pemberdayaan.
- 2) Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif jika masyarakat lokal dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat merasa memiliki, yang meningkatkan komitmen dan partisipasi mereka dalam menjalankan program pemberdayaan.
- 3) Pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator atau pemerintah daerah secara berkelanjutan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka. Pembinaan yang konsisten

memungkinkan mereka untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pemberdayaan.

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.42
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 57.595.000	Rp 17.982.250	Rp 39.612.750
Efisiensi				Rp 39.612.750

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, menggambarkan informasi tentang anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Anggaran awal untuk program ini sebesar Rp 57.595.000, sedangkan anggaran akhir atau yang telah mengalami perubahan menjadi Rp 17.982.250. Selisih antara anggaran awal dan anggaran akhir adalah Rp 39.612.750, yang menunjukkan adanya efisiensi sebesar Rp 39.612.750.

- g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	79.27

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerjasama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat desa, terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.982.250 dengan realisasi sebesar Rp 14.255.000 dengan tingkat capaian sebesar 79.27%.

8. Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.44 sebagai berikut :

Tabel 3.44

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, kedua indikator kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Untuk persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan, target yang ditetapkan adalah 100%, dan pencapaian serta realisasi pada indikator ini juga tercatat 100%, yang berarti pelaksanaan urusan yang ditugaskan telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan target yang diharapkan.

b) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2021

s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.45 sebagai berikut :

Tabel 3.45
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Persentase fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, tidak ada data yang tersedia (tercatat sebagai N/A), Pada tahun 2025, terdapat dua indikator kinerja yang tercatat. Pertama, persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan target 100%, realisasi 100%, dan capaian juga 100%. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan yang ditugaskan telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan target yang ditetapkan.

- c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran kinerja Program

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.46 sebagai berikut :

Tabel 3.46

Perbandingan Capaian Kinerja kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, untuk indikator persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan, target yang ditetapkan adalah 100%, dan realisasi serta capaian tercatat 100%, yang berarti pelaksanaan urusan yang ditugaskan telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan target yang diharapkan. Target untuk tahun 2026 (akhir Renstra) juga tetap 100%, dan

persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pencapaian kinerja di bidang ini sangat optimal. Begitu pula dengan indikator persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, yang juga memiliki target 100% dan tercatat 100% pada capaian tahun 2025. Meskipun demikian, tidak ada data yang tersedia mengenai target 2026 atau persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 untuk indikator ini, yang tercatat sebagai N/A.

- d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi

dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.47 sebagai berikut :

Tabel 3.47

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan

Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kedua indikator kinerja yang dianalisis menunjukkan realisasi yang sangat baik, dengan persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dan tercatat 100%. Ini menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut telah tercapai dengan sempurna. Namun, untuk data lebih lanjut, tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e) Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Koordinasi antara berbagai instansi atau unit di dalam Kecamatan dapat mempermudah pelaksanaan urusan yang ditugaskan. Kolaborasi yang baik antara pejabat Kecamatan dan pihak terkait di luar Kecamatan juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian urusan yang ditugaskan.
- 2) Keberhasilan kegiatan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup dan penggunaan sumber daya yang efisien. Anggaran yang memadai memungkinkan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, serta mendukung pengadaan materi, fasilitas, dan honorarium fasilitator yang berkualitas.

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau

hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.48
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.650.000	Rp 4.385.000	Rp (1.735.000)
Efisiensi				

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, anggaran awal atau induk yang disetujui sebesar Rp 2.650.000. Namun, setelah perubahan anggaran akhir menjadi Rp 4.385.000. Dengan demikian, ada peningkatan anggaran akhir tersebut sehingga tidak ada efisiensi.

g) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	41,05%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan. Pada kegiatan ini, realisasi kinerjanya mencapai 100%, yang berarti seluruh koordinasi pencegahan gangguan telah dilakukan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah, terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.650.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.800.000 dengan tingkat capaian sebesar 41,05%..

9. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi

Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.50 sebagai berikut :

Tabel 3.50
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada indikator kinerja "Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah," satuan yang digunakan adalah persen (%). Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, sementara realisasi yang tercapai sebesar 100%. Dengan demikian, capaian persentase pemenuhan layanan ini mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

- b) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.51 sebagai berikut :

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2022				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	108,35	108,35
Tahun 2025				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, tidak ada data yang tersedia (tercatat sebagai N/A), sehingga tidak

dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, indikator kinerja yang dianalisis adalah persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Target yang ditetapkan adalah 100%, namun realisasi yang tercatat adalah 100%, dengan capaian sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pencapaian yang cukup tinggi, target yang ditetapkan belum tercapai sepenuhnya, dengan selisih 100%.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.52 sebagai berikut

Tabel 3.52
Perbandingan Capaian Kinerja kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025
dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja yang dianalisis adalah persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah dengan capaian tahun 2025 yang mencapai 100%. Sedangkan untuk target akhir Renstra 2026, nilai yang ditetapkan adalah 100%. Dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 100%, persentase kinerja Renstra sampai dengan tahun 2025 juga tercatat sebesar 108,35%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tambak telah mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan, meskipun ada sedikit penurunan dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Namun, capaian yang sangat mendekati target tersebut mencerminkan kinerja yang cukup baik dan menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam memenuhi target Renstra.

- d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.53 sebagai berikut :

Tabel 3.53

Perbandingan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja yang diukur adalah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 100%. Namun, untuk data lebih lanjut, tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

- e) Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Penyusunan Program yang Tepat Sasaran serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada.
- 2) Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan mendukung kelancaran implementasi program.
- 3) Perumusan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
- 4) Optimalisasi koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program.
- 5) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja dan capaian.

Beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Evaluasi berkala rutin dilakukan terhadap pelaksanaan program untuk menilai apakah prioritas yang sudah berubah masih relevan dengan kondisi saat itu sehingga program tetap berjalan efektif.
- 2) Revisi anggaran untuk gaji dan tunjangan guna penyesuaian anggaran untuk mengganti selisih yang terjadi akibat kekurangan pegawai. Anggaran yang tidak terpakai dalam komponen gaji dan tunjangan bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang mendesak.
- 3) Koordinasi dengan pihak berwenang dengan meningkatkan koordinasi antara pihak pelaksana program dan instansi terkait agar perubahan kebijakan atau peraturan dapat segera diketahui dan direspons dengan cepat. Ini dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan tersebut.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, program akan lebih siap dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaannya, dan dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat perubahan prioritas, keterbatasan pegawai, atau perubahan kebijakan yang mendadak.

f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Tambak telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Tambak untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program

dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.54
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Rp 2.713.357.564	Rp 2.437.555.125	Rp 275.802.439
Efisiensi				-

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Tambak, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, menunjukkan informasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran awal atau induk untuk program ini adalah sebesar Rp 2.713.357.564, namun anggaran perubahan menjadi Rp 2.437.555.125. Selisih antara anggaran induk dan perubahan akhir adalah Rp 275.802.439.

- g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.55
Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	94,72

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	86,29
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100	93,98
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100	99,38
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	116,67	89,30
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	98,75

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan barang milik daerah yang ada di kecamatan tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.957.500 dengan realisasi sebesar Rp 30.269.500 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108,35 % dan realisasi keuangan sebesar 94,72%.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, terdiri atas 7 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74.782.053 dengan realisasi sebesar Rp 64.528.000 dengan tingkat capaian realisasi kinerja 100 % dan

realisasi keuangan sebesar 86,29%.

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya jasa yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 263.648.315 dengan realisasi sebesar Rp 247.825.870 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 93,98 %.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang milik daerah yang berkualitas dan sesuai anggaran, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.950.000 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 99,38 %.

5) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan, alokasi dan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pemerintahan, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.056.767.259 dengan realisasi sebesar Rp 1.836.749.839 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 116,67 % dan realisasi keuangan sebesar 89,30 %.

6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, akurat, dan tepat sasaran, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.370.000 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98,75 %.

C. REALISASI ANGGARAN

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi keuangan	Persen
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.437.555.127	2.189.693.209	89,83%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.390.000	1.380.000	99,28%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.982.250	14.255.000	79,27%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.016.000	27.000.000	99,94%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.385.000	1.800.000	41,05%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.020.000	15.895.000	99,22%
TOTAL		2.504.348.377	2.250.023.209	89,84%

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Tabel 3.7
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	-	104.5%	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	6	102,83 %	2.250.023.209	89,84%
Jumlah				Rp.	89,84%

Sumber : E-Monev

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Tambak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Tambak telah memperoleh penghargaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupaun Nasional atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Tambak sebagai berikut :

Tabel 3.15

Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kecamatan Tambak
Tahun 2025

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	SPIP Terbaik 1	Inspektorat Kab. Banyumas
2.		
3.		

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tambak Tahun 2025 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kec. Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kec. Tambak agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target;
2. Kecamatan Tambak agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kec. Tambak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Kecamatan Tambak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku